

Analisis Prosedur Audit Internal terhadap Siklus Pembelian Tidak Langsung pada PT Barata Indonesia (PERSERO)

Iftitah Aulia Safitri¹, Anik Yuliati²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
21013010132@student.upnjatim.ac.id¹, anikyuliati.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The more complex a business is, the more optimized the internal control system must be. Management can carry out internal audits to evaluate the quality and performance of the company's internal control system. The inspections carried out cover the entire cycle of business activities in the company, one of which is the internal audit of the purchasing cycle. The purpose of this research is to determine the internal audit procedures for the indirect purchasing cycle used by PT Barata Indonesia (Persero). The method used in this research is a qualitative descriptive approach which obtain descriptive data in the form of words and images. The research results show that PT Barata Indonesia (Persero) has implemented an internal control system in carrying out its business activities. The internal audit procedure carried out by the company is a form of evaluating the quality, performance and effectiveness of the internal control system for the indirect purchasing cycle.

Keywords: internal control, internal audit, purchase cycle

ABSTRAK

Semakin kompleks suatu bisnis, maka sistem pengendalian internalnya harus semakin optimal. Manajemen dapat melakukan audit internal untuk mengevaluasi kualitas dan kinerja sistem pengendalian internal perusahaan. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup seluruh siklus kegiatan bisnis di perusahaan, salah satunya adalah audit internal siklus pembelian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur audit internal siklus pembelian tidak langsung yang digunakan oleh PT Barata Indonesia (Persero). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang memperoleh data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Barata Indonesia (Persero) telah menerapkan sistem pengendalian internal dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prosedur audit internal yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk penilaian terhadap kualitas, kinerja, dan efektivitas sistem pengendalian internal pada siklus pembelian tidak langsung.

Kata kunci: pengendalian internal, audit internal, siklus pembelian

PENDAHULUAN

Di era revolusi industri 5.0 saat ini, kemajuan teknologi terus dikembangkan untuk meningkatkan digitalisasi dan otomatisasi sistem dalam industri dan sektor produksi. Seiring dengan berjalannya waktu, adaptasi penerapan revolusi industri 5.0 yang serba otomatis dan digital ini memudahkan para pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Semakin berkembangnya usaha, maka semakin kompleks kegiatan usaha yang dijalankan. Potensi risiko-risiko kecurangan yang akan terjadi di masa depan juga semakin meningkat. Seperti pada PT Barata Indonesia (Persero) sebagai perusahaan milik pemerintah (BUMN) yang bergerak di

bidang industri manufaktur. Perusahaan ini menyediakan produk dan layanan jasa industri seperti pengecoran, manufaktur, dan EPC (*Engineering, Procurement, and Construction*) untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur serta pekerjaan konstruksi berat. Melihat betapa kompleksnya kegiatan bisnis perusahaan, manajemen harus mengoptimalkan pengendalian internal perusahaan demi keberlanjutan kegiatan usahanya.

Sistem pengendalian internal mencakup kebijakan dan mekanisme yang diterapkan dalam menjalankan seluruh kegiatan usaha perusahaan yang disusun untuk menjamin serta memastikan tercapainya tujuan perusahaan. Fungsi dari pengendalian internal adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas informasi keuangan dan akuntansi, juga untuk mengurangi risiko kecurangan yang akan terjadi. Fungsi lain dari pengendalian internal yaitu mengarahkan aktivitas operasional perusahaan, mencegah penyalahgunaan sistem yang digunakan, dan menjaga keamanan aset perusahaan. (Apandi & Nasution, 2022).

Pengendalian internal yang digunakan pada PT Barata Indonesia (Persero) salah satunya yaitu penerapan *check lock* dengan *finger print* guna mencatat absensi jumlah jam kerja karyawan dengan lebih tersistem dan menghindari adanya kesalahan catat pada jam kerja karyawan. Kemudian, pemisahan tugas pada tiap-tiap divisi untuk menghindari adanya risiko kecurangan (*fraud*) dan *human error*. Misalnya, untuk persetujuan terkait faktur pembelian dilakukan oleh Biro Management Supply Chain (BMSC) atau divisi pengadaan yang kemudian dijurnal oleh divisi akuntansi dan dibayarkan oleh divisi keuangan. Kemudian, pembagian otorisasi terhadap verifikasi dan *approval* dari tiap-tiap divisi oleh kepala divisi masing-masing. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pembentukan utang serta pembukuannya secara akuntansi juga termasuk pengendalian internal yang diterapkan pada PT Barata Indonesia (Persero) oleh unit SPI untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar kebijakan yang berlaku serta masih banyak lagi.

Dalam mengevaluasi kualitas, kinerja, dan efektivitas dari sistem pengendalian internal yang telah diterapkan, manajemen perusahaan dapat melakukan pemeriksaan internal (audit internal) yang didelegasikan pada unit khusus perusahaan. Unit khusus ini adalah unit Satuan Pengawas Internal (SPI) yang bersifat independen dan objektif dalam menjalankan tugasnya. Auditor internal merupakan perantara bagi manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha demi mencapai tujuan perusahaan.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tugas dari Dewan Pengawas atau Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah mengawasi dan memberikan nasihat atau rekomendasi terhadap direksi dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan. Pengawasan dilakukan bersama dengan komisaris untuk menilai dan mengevaluasi seberapa nyata penerapan prosedur/kebijakan perusahaan pada keadaan yang sebenarnya. (PP45/2005 et al., 2005).

Selama bertahun-tahun audit internal telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi sehingga dapat mencapai ruang lingkup yang lebih luas dan memungkinkan audit internal dalam berkontribusi

terhadap perusahaan. (Nixon, 2019). Menurut Dena Eka, pemeriksaan internal atau audit internal memiliki karakteristik dan fungsi pokok yaitu melakukan diskusi mengenai permasalahan internal yang ada di perusahaan dan menjamin hasil evaluasi serta pengujian suatu kegiatan perusahaan yang disesuaikan dengan kriteria yang tepat serta memberikan rekomendasi terkait rangkaian tindakan perbaikan kepada manajemen dan dewan direksi. (Agustina, 2020). Audit internal dilakukan dengan menguji suatu aktivitas atau siklus perusahaan yang disesuaikan dengan kriteria atau asersi yang ditentukan.

PT Barata Indonesia (Persero) merupakan perusahaan yang terdiri dari beberapa unit divisi yang tersusun menjadi struktur organisasi, salah satu di antaranya yaitu unit Satuan Pengawas Internal (SPI). Unit ini bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) internal terhadap semua aktivitas perusahaan. Salah satu pekerjaan dari unit SPI pada PT Barata Indonesia (Persero) yaitu melakukan pemeriksaan rutin (audit internal) terhadap siklus pembelian tidak langsung. Siklus pembelian tidak langsung merupakan siklus dari transaksi pembelian di PT Barata Indonesia (Persero) yang menggunakan sistem kontrak. Terdapat susunan prosedur dalam melakukan audit internal perusahaan. Meninjau latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui prosedur audit internal terhadap siklus pembelian tidak langsung yang digunakan oleh PT Barata Indonesia (Persero).

TINJAUAN LITERATUR

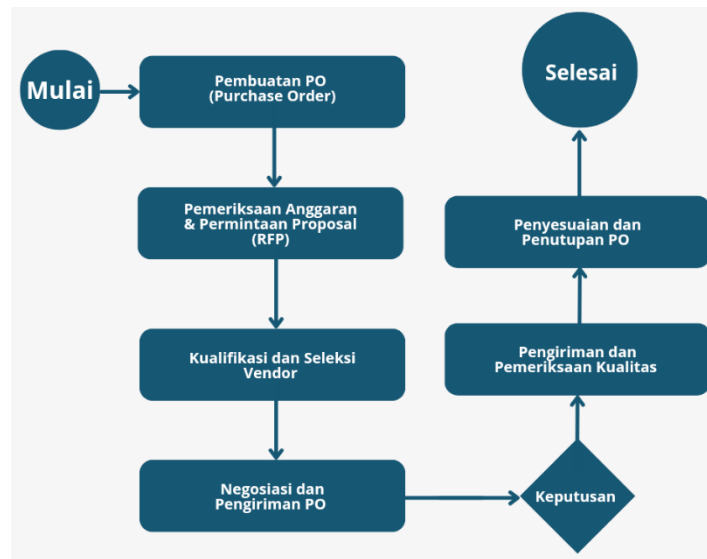
Sistem Akuntansi

Sistem adalah suatu rangkaian metode, prosedur, dan rutinitas terperinci untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti melakukan tugas, mencapai tujuan, dan memecahkan satu atau lebih masalah. (Romney & Steinbard, 2020). Menurut Mulyadi (2017) sistem adalah suatu organisasi unsur yang saling terhubung erat dan berfungsi untuk meraih tujuan tertentu. Umumnya, sistem terdiri dari berbagai bagian kecil yang disebut dengan subsistem yang dapat mendukung sistem utama. Setiap sistem pasti terdapat struktur dan proses. Dalam struktur sistem terdapat banyak unsur yang membentuk sistem tersebut dan proses sistem adalah cara kerja dari masing-masing unsur sistem untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, perusahaan adalah sistem yang terdiri dari beberapa departemen atau divisi yang masing-masing merupakan subsistem atau unsur sistem yang membentuk struktur sistem. Setiap divisi dirancang untuk mendukung perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi atau proses sistem untuk mencapai satu atau lebih tujuan.

Sistem informasi sangat berperan penting bagi jalannya kegiatan operasional perusahaan salah satunya yaitu sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan suatu sistem guna merangkum semua aktivitas dan transaksi perusahaan untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh manajemen sebagai alat pengendalian guna keberlangsungan aktivitas operasional perusahaan di masa mendatang. (Prastyaningtyas, 2019). Sedangkan, Mulyadi (2017) mendefinisikan sistem akuntansi sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang diolah untuk menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen agar

memudahkan dalam mengelola perusahaan.

Cabang dari sistem akuntansi salah satunya yaitu sistem akuntansi pembelian. Sistem akuntansi pembelian dalam perusahaan berfungsi sebagai sistem pengadaan atau penyediaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. (Mulyadi, 2017). Sistem akuntansi pembelian menjadi tanggung jawab dari unit fungsional perusahaan umumnya seperti fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi pembelian terdapat siklus pesanan pembelian. Langkah-langkah dalam siklus pembelian dimulai dari pemeriksaan anggaran hingga penyesuaian dan penutupan PO. Siklus pesanan pembelian dapat dilihat pada gambar siklus berikut:



Gambar 1 Siklus Pesanan Pembelian

Sumber: Author

Berikut dapat diuraikan mengenai penjelasan siklus pesanan pembelian pada gambar di atas (Kissflow, 2024):

1. Pembuatan Pesanan Pembelian (PO)
Permintaan pembelian yang telah disetujui dan diotorisasi, akan diproses menjadi pesanan pembelian. Pesanan pembelian dibuat oleh unit divisi pengadaan pada suatu perusahaan.
2. Pemeriksaan Anggaran dan Proposal Penawaran *RFP*
Setelah divisi pengadaan membuat permintaan pembelian, divisi keuangan akan melakukan pemeriksaan anggaran. Kemudian memeriksa apakah terdapat proposal penawaran atau tidak. Jika ada, maka pesanan pembelian akan dikirimkan kepada vendor. Jika tidak ada penawaran, maka divisi pengadaan dapat mengirimkan proposal penawaran atau *RFP (Request for Proposal)* ke daftar calon vendor dengan tujuan untuk mendapat penawaran atas suatu produk atau jasa.

3. Kualifikasi dan Seleksi Vendor
Setelah menerima penawaran dari vendor, divisi pengadaan akan menyeleksi kebutuhan bisnis dengan proposal vendor. Pada saat pemilihan vendor, divisi pengadaan berdiskusi dengan para pemangku kepentingan perusahaan.
4. Negosiasi dan Pengiriman PO
Setelah pemilihan vendor, akan dilakukan negosiasi mengenai kontrak. Vendor dan pembeli akan berdiskusi mengenai hal-hal yang terkait dengan pembentukan hubungan bisnis yang lebih baik. Hal-hal yang didiskusikan umumnya mencakup kendala waktu, harapan pengiriman, kualitas, syarat pembayaran, kewajiban dan risiko, penyelesaian sengketa, dan perubahan persyaratan (jika ada). Setelah negosiasi, pesanan pembelian akan diteruskan ke vendor untuk disetujui. Persetujuan dan pengakuan vendor akan mengaktifkan kontrak yang mengikat secara hukum antara vendor dan pembeli.
5. Pengiriman dan Pemeriksaan Kualitas Produk/Jasa
Umumnya, vendor akan mengirimkan pemberitahuan pengiriman terlebih dahulu kepada pembeli. Pemberitahuan ini terdiri dari tanggal pengiriman, rincian ekspedisi, nomor resi, salinan PO, faktur, dan sebagainya. Setelah menerima produk, pembeli akan memeriksa slip kemasan dan informasi PO serta mengakui tanda terima. Pembeli akan memeriksa kualitas produk dan memberitahu vendor jika pesanan telah sesuai atau tidak karena kerusakan atau cacat saat barang dikirim.
6. Penyesuaian dan Penutupan PO
Penyesuaian akan dilakukan dengan mengevaluasi tiga dokumen pembelian yaitu daftar permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan faktur vendor untuk memastikan bahwa semua telah sesuai dan memverifikasi keakuratan informasi. Jika terdapat perbedaan, maka perlu adanya penyelesaian tindak lanjut dari kedua pihak sesuai dengan yang telah disebutkan dalam kontrak pembelian. Setelah penyesuaian selesai, faktur disetujui dan diteruskan ke pemrosesan pembayaran sesuai standar kebijakan perusahaan.

Prosedur Pencatatan Utang

Dalam bukunya, Mulyadi (2017) menyebutkan bahwa metode pencatatan utang terdiri dari dua macam, yaitu *account payable procedure* dan *voucher payable procedure*. Pada *account payable procedure* terdapat catatan utang berupa kartu utang yang disediakan dan digunakan untuk menjabarkan mengenai nomor faktur vendor jumlah terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang dari masing-masing vendor. Sedangkan, pada *voucher payable procedure* tidak menggunakan kartu utang melainkan menggunakan arsip *voucher* (bukti kas keluar) yang disimpan atau diarsip menurut abjad maupun tanggal jatuh temponya. Arsip *voucher* ini yang nantinya akan berfungsi sebagai catatan utang. (Mulyadi, 2017). *Account payable procedure* menggunakan dokumen berupa faktur dari vendor (*vendor invoice*), kuitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh vendor, kartu utang, jurnal pembelian, dan

jurnal pengeluaran kas. Dalam *voucher payable procedure*, dokumen yang digunakan yaitu bukti kas keluar, register kas keluar, dan register cek.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem akuntansi diterapkan untuk berbagai tujuan dan kegunaan, salah satunya adalah untuk membantu manajemen dalam pengendalian internal dengan melakukan pemeriksaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Dalam suatu perusahaan atau organisasi umumnya terdapat divisi Satuan Pengawas Internal (SPI). SPI ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian internal di perusahaan. Menurut Efa Wahyu Prastyaningtyas (2019) pengendalian (*control*) merupakan proses untuk mengarahkan dan memengaruhi kegiatan suatu sistem di perusahaan.

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations), pengendalian internal merupakan proses yang dilaksanakan oleh jajaran direksi, dewan komisaris, manajemen, dan personalia lain yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi terkait, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan pelaporan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. (Tuanakotta, 2019). Sistem pengendalian internal terdiri atas struktur suatu perusahaan, metode, dan ukuran-ukuran yang dikelola untuk menjamin keamanan aset perusahaan, memeriksa dan mengawasi ketepatan serta keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi juga kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. (Mulyadi, 2017). Dalam implementasinya, SPI mampu membantu perusahaan untuk melindungi aset perusahaan menggunakan pengawasan detail dan kecermatan informasi akuntansi. (Fahriza et al., 2022).

Menurut Theodore Tuanakotta (2019), terdapat tiga kategori tujuan pengendalian internal yaitu:

1. Tujuan operasional berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan perusahaan termasuk tercapainya target operasional dan keuangan, serta keamanan aset atas kerugian.
2. Tujuan pelaporan berkenaan dengan pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang bersifat internal atau eksternal terkait keandalan (*reliability*), tepat waktu (*timeliness*), keterbukaan (*transparency*) serta persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh regulator, peraturan perundang-undangan, ataupun kebijakan perusahaan.
3. Tujuan kepatuhan berkenaan dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan ketentuan undang-undang yang relevan dengan perusahaan.

Audit Internal

Dalam bukunya, Mulyadi mendefinisikan audit sebagai suatu langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan dan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti secara objektif terkait pernyataan mengenai aktivitas dan peristiwa ekonomi. (Mulyadi, 2017). Audit serupa dengan suatu proses independen untuk mengevaluasi dan memverifikasi keuangan, operasional, atau sistem informasi suatu

entitas yang bertujuan untuk memberikan keyakinan atau opini mengenai kepatuhan dan kelayakan informasi yang diaudit.

Menurut IIA (The Institute of Internal Auditors) audit internal merupakan aktivitas yang memberikan jaminan dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk meningkatkan nilai dan kinerja suatu perusahaan. Dengan adanya audit internal dapat membantu memudahkan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan melalui pendekatan sistematis, disiplin mengevaluasi, dan mendorong efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi. (Tuanakotta, 2019). Dalam praktiknya, audit internal dilakukan oleh auditor internal yang merupakan bagian dari perusahaan yang sedang diaudit. Meskipun auditor internal merupakan bagian dari perusahaan, tetapi auditor internal haruslah independen dan objektif dalam melakukan audit terhadap divisi-divisi lainnya yang diperiksa atau diaudit. Auditor internal ini umumnya memiliki kewenangan untuk memperoleh dan mengakses data serta informasi yang diperlukan dari auditee selama proses audit. Auditor internal dapat memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dan kekurangan dalam sistem perusahaan yang diperiksa.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2019), audit internal terdiri dari dua kegiatan yaitu kegiatan asurans atau jaminan yang bersifat independen dan objektif. Pada kegiatan asurans ini auditor internal memberikan jaminan keyakinan yang memadai. Kemudian kegiatan kedua yaitu konsulting yang mana auditor internal memberikan saran, petunjuk dan pelatihan.

Menurut Sukrisno Agoes (Agoes, 2018), pemeriksaan (audit) internal yang dilakukan oleh auditor internal bertujuan untuk membantu seluruh manajemen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya dengan memberikan analisa, evaluasi (penilaian), saran dan ulasan terkait dengan hal yang sedang diperiksa.

Audit internal berbeda dengan audit eksternal yang dilakukan oleh pihak independen di luar organisasi, seperti firma akuntan publik. Meskipun auditor internal dan eksternal memiliki tujuan yang serupa dalam mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas, auditor internal biasanya fokus pada kepentingan internal organisasi untuk memastikan bahwa operasi berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan fokus dan permasalahan penelitian. Penelitian kualitatif merupakan ragam penelitian yang temuannya tidak didapat menggunakan prosedur statistik, melainkan diperoleh dengan pemahaman dan penafsiran makna, kejadian, interaksi, dan perilaku subjek dalam keadaan tertentu menurut perspektif penelitiannya. (Feny Rita Fiantika et all, 2022). Pendekatan deskriptif merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk meneliti fenomena, peristiwa, atau perilaku subjek yang diteliti dan dituangkan kembali dalam bentuk data deskriptif. Deskripsi berupa kata-kata dan gambar merupakan

karakteristik dari penelitian deskriptif, lain halnya dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan angka. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Siklus Pembelian Tidak Langsung pada PT Barata Indonesia (Persero)

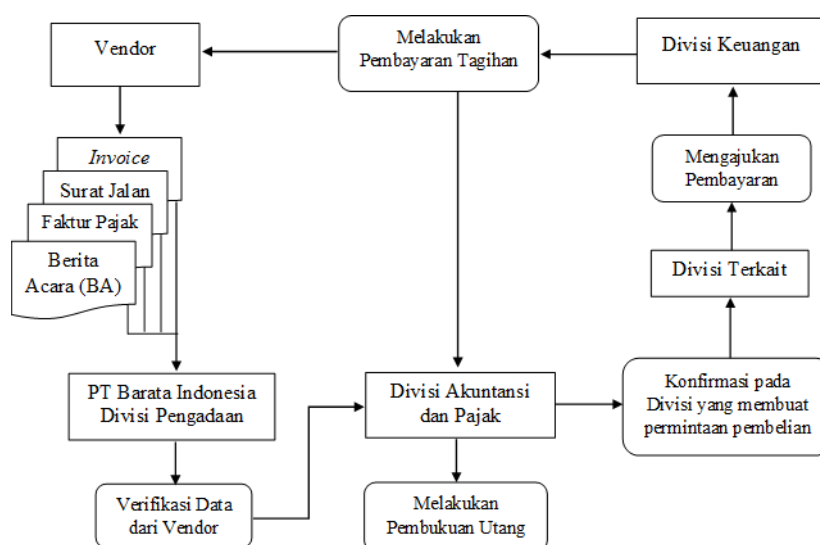
Secara umum, siklus pembelian tidak langsung pada PT Barata Indonesia (Persero) sama dengan teori siklus pembelian yang ada. Divisi *Management Supply Chain* (Divisi Pengadaan) akan membuat pesanan pembelian berdasarkan daftar permintaan pembelian. Pembelian tidak langsung yang dimaksud yaitu pembelian menggunakan kontrak yang mengatur secara hukum terkait perjanjian antara vendor dan perusahaan.

Prosedur pencatatan utang yang digunakan dalam siklus pembelian tidak langsung pada PT Barata Indonesia (Persero) lebih mengacu pada *account payable procedure*, karena pada file pembukuan secara akuntansi format yang digunakan sesuai dengan *account payable procedure* yaitu terdapat nomor faktur vendor, jumlah terutang, dan jumlah pembayaran.

Divisi yang terhubung dalam prosedur pembayaran tagihan pada vendor yaitu Divisi Pengadaan, Divisi Akuntansi, dan Divisi Keuangan. Alur dari pembayaran tagihan di PT Barata Indonesia (Persero) meliputi:

1. Vendor mengirimkan dokumen tagihan berupa *invoice*, surat jalan, faktur pajak, dan berita acara (jika ada) kepada perusahaan yang diterima dan diproses oleh Divisi *Management Supply Chain* menjadi surat permintaan pembayaran (SPERPEMB).
2. Kemudian SPERPEMB tersebut diserahkan pada Divisi Akuntansi untuk dilakukan pembukuan utang secara akuntansi pada sistem.
3. Divisi Akuntansi meneruskan catatan pembukuan tersebut kepada divisi terkait yang membutuhkan pengadaan barang.
4. Divisi terkait akan mengajukan pembayaran ke Divisi Keuangan untuk melakukan pembayaran tagihan kepada vendor.

Terdapat ilustrasi alur pembayaran tagihan vendor di PT Barata Indonesia (Persero) seperti di bawah ini.



Gambar 2 Alur Pembayaran Tagihan Vendor PT Barata Indonesia (Persero)

Sumber: Unit SPI PT Barata Indonesia (Persero)

Pengendalian internal terhadap Siklus Pembelian Tidak Langsung PT Barata Indonesia (Persero)

Aktivitas bisnis yang ada dalam siklus pembelian tidak langsung memiliki berbagai macam risiko, beberapa di antaranya seperti berikut:

1. Risiko harga yang tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya)
2. Pembelian atas jasa atau barang yang tidak diotorisasi
3. Pembelian fiktif (barang tidak ada)
4. Jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan retensi yang tidak dilakukan atau diperpanjang sesuai dengan perjanjian kontrak
5. Tidak dilakukan monitor permintaan SSP atas faktur pajak kode 010
6. Saldo utang usaha tidak sesuai dengan neraca
7. Transaksi dalam siklus pembelian dicatat pada periode tepat, dsb.

Dari beberapa risiko diatas, perusahaan telah memiliki pengendalian internal untuk mencegah dan mengendalikan risiko-risiko tersebut. Kebijakan pengadaan dan kebijakan keuangan perusahaan merupakan peraturan atau SOP yang mengatur pengendalian terhadap risiko siklus pembelian tidak langsung pada PT Barata Indonesia (Persero). Selain kebijakan-kebijakan yang mengatur, ada juga aplikasi pendukung guna mendukung pengendalian yaitu SAP (System Application and Product in data processing). Aplikasi ini digunakan untuk mendukung pengelolaan data dari berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Prosedur Audit Internal pada PT Barata Indonesia (Persero)

Kegiatan audit yang dilaksanakan di PT Barata Indonesia (Persero) ada beberapa macam, seperti audit oleh KAP, BPK, dan pemeriksaan rutin (audit internal). Peneliti akan memfokuskan bahasan mengenai prosedur pemeriksaan rutin (audit internal) oleh unit SPI di PT Barata Indonesia terutama pada audit siklus pembelian tidak langsung. Pemeriksaan rutin atas siklus pembelian tidak langsung

bertujuan untuk memeriksa dan memastikan Divisi *Management Supply Chain* (Divisi Pengadaan) telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan kebijakan pembelian yang telah ditetapkan oleh perusahaan, memastikan Divisi Akuntansi dan Divisi Keuangan telah membuku serta melakukan pembayaran sesuai dengan standar dan kontrak pembelian yang telah disepakati dengan vendor. Selain itu, pemeriksaan rutin ini dilakukan sebagai bentuk pengendalian internal di perusahaan dan mencegah terjadinya risiko-risiko kesalahan yang ada.

Pemeriksaan rutin (audit internal) di PT Barata Indonesia (Persero) terdiri dari audit pada beberapa siklus, di antaranya audit siklus kas bank, audit siklus pembelian langsung, dan audit siklus pembelian tidak langsung. Prosedur audit internal disesuaikan dengan subjek dan objek yang diaudit. Adapun prosedur audit internal yang dilakukan oleh unit SPI di PT Barata Indonesia (Persero) meliputi:

1. Direktur utama menugaskan SPI untuk melakukan pemeriksaan rutin pada siklus yang ditentukan. Misalnya, siklus pembelian tidak langsung.
2. Auditor membuat kertas kerja monitoring yang digunakan untuk mencatat prosedur audit yang dilakukan, mencatat bukti audit yang diperoleh, dan alokasi pekerjaan antara anggota tim audit. Tujuan dibuatnya kertas kerja monitoring ini adalah untuk memudahkan auditor dalam menghasilkan temuan awal. Berikut format kertas kerja monitoring unit SPI di PT Barata Indonesia (Persero) pemeriksaan rutin pada siklus pembelian tidak langsung.

Table 1 Format Kertas Kerja Monitoring

Sumber: Unit SPI PT Barata Indonesia (Persero)

No.	Proses/Transaksi Utama	Risiko Utama	Aseri	Pengendalian
1.	Pembelian tidak langsung	Harga yang tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya)	Alokasi, Kelengkapan	Kebijakan pengadaan
		Pembelian atas jasa/barang yang tidak diotorisasi	Kelengkapan	Kebijakan pengadaan
		Dan sebagainya		

3. Auditor mengumpulkan informasi atau meminta dokumen-dokumen bukti audit yang telah disiapkan oleh auditee (divisi terkait dalam siklus yang diaudit).
4. Auditor meminta klarifikasi atau konfirmasi pada auditee terkait pertanyaan yang timbul ketika auditor telah mengumpulkan hasil sampling dokumen.
5. Setelah auditor berhasil mendapatkan hasil sampling yang cukup dan relevan, auditor merumuskan temuan-temuan dan rekomendasi untuk mengembangkan rencana tindakan dalam memperbaiki kesenjangan.

Auditor melaporkan temuan dan rekomendasi tersebut dalam bentuk LHP (laporan Hasil Pemeriksaan).

6. Auditor menyerahkan LHP kepada direktur utama. Selain itu, LHP juga diserahkan pada dewan komisaris selaku komite audit. LHP tersebut dilaporkan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil audit tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat disusun berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, mengenai prosedur audit internal atas siklus pembelian tidak langsung pada PT Barata Indonesia (Persero) yaitu perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian internal dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut tercermin dari pemisahan tanggung jawab fungsional dan pembagian otorisasi (wewenang) terhadap persetujuan-persetujuan tugas dari tiap-tiap divisi oleh kepala divisi masing-masing.

Prosedur audit internal yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk dari evaluasi kualitas, kinerja, dan efektivitas sistem pengendalian internal terhadap siklus pembelian tidak langsung yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan tanggung jawab pada Divisi Pengadaan, Akuntansi dan Keuangan bahwa telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2018). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik Buku 1*. Salemba Empat.
- Agustina, D. E. (2020). *Pengaruh Pemeriksaan Internal (Audit Intern) terhadap Efektivitas Pengendalian Internal to determine whether internal audit influenced the internal controls effectiveness*. 2016, 73-79.
- Apandi, A., & Nasution, N. (2022). Peran Audit Internal terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Perolehan Aset Tetap (Studi Kasus BPRS Harta Insan Karimah Bekasi). *Jurnal Akuntansi STEI Volume*, 05(02), 1-8.
- Fahriza, T. A., Hidayati, U., & Agista Mahardika, E. (2022). Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Pencegahan Kecurangan Akuntansi. *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)*, 2(1), 86-95. <https://doi.org/10.33005/senapan.v2i1.174>
- Fiantika, Feny Rita., et all. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret).
- Kissflow. (2024). *The Purchase Order Cycle: A Guide to Master the Purchase Order Process*.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi* (4th ed.). Salemba Empat.
- Nixon, M. (2019). *Manajemen Risiko, Internal Kontrol, Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Keuangan BUMN dengan Maturity Level Departemen Audit Internal sebagai Pemoderasi.pdf*. 6.
- PP45/2005, UUD/1945, UU1/1995, UU17/2003, & UU19/2003. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. *Presiden Republik Indonesia*, 1, 1-5.
- Prastyaningtyas, E. W. (2019). *Sistem Akuntansi*. CV Azizah Publishing.
- Romney, M. B., & Steinbard, P. J. (2020). *Informasi akuntan* (15th ed.).
- Tuanakotta, T. (2019). *Audit Internal Berbasis Risiko*. Salemba Empat.